DAFTAR REFRENSI

Adami Chazawi., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada,. Jakarta.

Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan. IPB. Bogor.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Abdul Rahman Tibahary, "K*epastian Hukum Dalam Transaksi Jual - Beli Telepon Genggam (Handphone) Di Pasar Gelap*. https://repository.unismuhpalu.ac.id.

Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Bisnis Atas UU No.40/2007 Tentang PT, Vol 26-No. 3 Tahun 2007.

Alvi Syahrin. 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Medan: PT. Sofmedia.

Amiruddin, U. 2022. Analisis ekonomi potensi kawasan hutan mangrove di Desa Kipai Kecamatan Patani. Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains, dan Humaniora. Vol. 1 No. 2.

Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bengen, D.G. 2002. Pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Bogor: Penerbit IPB.

Bina Syifa, "Solusi Memperbaiki Kerusakan Lingkungan Hidup Hutan Mangrove", melalui www.binasyifa.com

Bla Beto, 2019 ; Warta Rakyat, 21 Mei 2019; Tanjungpinang. https://wartarakyat.co.id diakases tanggal 3 Juni 2022 pukul. 14.30 Wib.

Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung. Penerbit Alumni.

Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman hayati laut. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P dan Sitepu, M.J. 2001. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita.

Donato, D.C., Kauffman, J.B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M. dan Kanninen, M. *Mangrove Salah Satu Hutan Terkaya Karbon di Daerah Tropis*. Brief CIFOR, 12:1. 201.

Erdianto, Ferawati dan Imam Aliani Putra (2021) Model Penyelesaian Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.11 (November 2021).

Ivan Wagner (2018) Pelaksanaan Perlindungan Hutan Mangrove Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Vol 3, No 3 (2015).

Harahab, N. 2010. Penilaian ekonomi ekosistem hutan mangrove dan aplikasinya dalam perencanaan wilayah pesisir. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Haris Herdiansyah. 2013. Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hilman Hadikusuma.1995. Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju.

Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan. Bandung: CV. Mandar Maju

Joko Subagyo. 2005. Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya). Jakarta: PT. Rineka Cipta

Kanter, E.Y. 1992. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni.

Khairul Hafsar. 2018. Kondisi Ekosistem Mangrove di Perairan Sei Carang Kota Tanjungpinang. Jurnal Akuatiklestari E-ISSN: 2598-8204. Vol. 1 No. 2: 8-12 Tahun 2018 hlm 9

Masruchin Ruba'i. 2014. dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, Banyumedia Publishing,. Malang.

Muhammad Akib. 2014. Hukun Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhamad Erwin. 2019. *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup* Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya

Nasir haya.. Analisis struktur ekosistem mangrove di desa kukupang kecamatan kepulauan joronga. Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan Vol. 6 No. 1 mei 2015: 79-89

Paulus Hadisuprapto, "Juvenile Delinquency". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ricky Marthin Wattimena. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai*. Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021: hlm 109 – 118 E-ISSN: 2775 – 6149.

Senoaji, G., & Hidayat, M. F. 2017. Peranan ekosistem mangrove di kota pesisir Bengkulu dalam mitigasi pemanasan global melalui penyimpanan karbon. Jurnal Manusia dan Lingkungan. Hlm 23 (3), 327-333.

Supriyadi A. 2004. Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan (Studikasus: Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur). Skripsi.

Supriharyono, 2009. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Sudarto, semarang. 2009. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.

Takdir Rahmadi. 2016. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Takarendehang, R., Sondak, C. F. A., Kaligis, E., Kumampung, D., Manembu, I. S., & Rembet, U. N. W. J. 2018. Kondisi ekologi dan nilai manfaat hutan mangrove di Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, 6 (2).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.